

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGGARAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA
BARAT, JAWA TENGAH, DAN JAWA TIMUR TAHUN 2015-2018**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu
dalam Ilmu Ekonomi Islam**

OLEH
HENI EKA ADHAMIA
NIM: 16810078

**PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi, termasuk kebijakan daerah dalam anggaran belanja daerahnya. Secara teori ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam, pengalokasian dana di suatu daerah harus tepat pada sasaran, karena dana termasuk salah satu alat untuk mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi dan mandiri suatu daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tahun 2015-2018 dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sesuai dengan kriteria metode *sampling* yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan data panel (kombinasi antara data *time series* dan *cross section*), dengan teknik analisis *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect* dengan menggunakan *eviews* 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah kecuali variabel PDRB. Variabel DAU, PAD, DBH, dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, sementara PDRB tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Kata Kunci: *Belanja Daerah, DAU, PAD, DBH, Jumlah Penduduk, PDRB*



ABSTRACT

Decentralization is the surrender of government power by the central government to autonomous regional governments based on autonomous principles, including regional policies within its region budget. Theoretically, the conventional economy as well as the Islamic economy, allocating funds in an area should be precise on the target, because the funds include one of the tools to reduce the gap in economic development and an area.

This research aims to determine the level of shopping district/city in West Java province. Central Java, and East Java in 2015-2018 were influenced by other factors. The object used in this study was 100 Regency/city in West Java province. Central Java, and East Java in accordance with the criteria of sampling method used.

The research uses a data panel (a combination of data time series and cross section), with Common Effect, Fixed Effect, and Random Effect analysis techniques using EViews 10. The results showed that of the entire variable had significant effect on regional expenditure except the PDRB variable. The DAU, PAD, DBH, and population variables have a positive and significant impact on local shopping, while PDRB has no impact on regional expenditure.

Keywords: shopping district, DAU, PAD, DBH, number of inhabitants, PDRB



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Heni Eka Adhamia

NIM : 16810078

Prodi : Ekonomi Syariah

Menyatakan Bahwa Skripsi yang Berjudul **“Faktor-faktor yang mempengaruhi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Tahun 2015-2018”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau pun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote* dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 15 September 2020

Penyusun



Heni Eka Adhamia
NIM.16810078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Heni Eka Adhamia

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Heni Eka Adhamia

NIM : 16810078

Judul Skripsi : **“Faktor-faktor yang mempengaruhi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Tahun 2015-2018”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini, kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 September 2020

Pembimbing,


Dr. Abdul Haris, M.Ag.

NIP. 19710423 199903 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-675/Un.02/DEB/PP.00.9/10/2020

Tugas Akhir dengan judul : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT, JAWA TENGAH, DAN JAWA TIMUR TAHUN 2015-2018**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **HENI EKA ADHAMIA**
Nomor Induk Mahasiswa : **16810078**
Telah diujikan pada : **Rabu, 30 September 2020**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Abdul Haris, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f77dc99a003



Penguji I
Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc.
SIGNED

Valid ID: 5f76c77f0ca2



Penguji II
Achmad Nurdany, S.E.I., S.E., M.E.K
SIGNED

Valid ID: 5f76b5412254



Yogyakarta, 30 September 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f7ade8f56227

MOTO

الأجرُ بِقَدْرِ التَّعبِ



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak Heri Purnomo dan Ibu Susmiyati yang senantiasa mendukung pendidikan saya selama ini

serta

Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Ahamdulillahi Rabbil 'Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat kepada penyusun sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada nabi junjungan Nabi Muhammad Sholallohu 'alaihi wa sallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang memperoleh syafa'atnya kelak di hari akhir.

Penelitian ini merupakan ujung tugas akhir guna menyelesaikan Pendidikan stata satu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga untuk memperoleh gelar S.E. Keberhasilan penulis dalam menyusun penelitian ini tidaklah luput dari banyak kekurangan serta kontribusi orang-orang terdekat yang mampu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis. Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu melancarkan penyusunan penelitian ini. Untuk itu penulis mengucapkan syukur, terimakasih dan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. Abdul Qoyyum, S.E.I., M.Sc.Fin. selaku Kaprodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan dan motivasi.

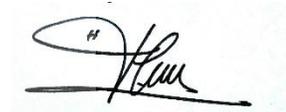
5. Ibu Riswanti Budi Sekaringsih.M,Sc. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama perkuliahan hingga akhir semester.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama saya menjalani Pendidikan.
7. Seluruh pegawai dan staff TU Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga.
8. Kedua orang tua yaitu Bapak Heri Purnomo dan Ibu Susmiyati serta adik Fitrahul Huda dan Zayyinna Ibnaty Musyfiqoh yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan dan semangat tanpa henti.
9. Orang special saya Bebeb Ayu Tika Pangestuti, Mbak Nur Faizah, dan Mas Fotografer yang telah menjadi pundak, kaki tangan, dan teman berjuang.
10. Sahabat-sahabat KKN 120 Dusun Grindang Hargomulyo Kokap Kulon Progo (Aulia, Dian, Lina, Iradatin, Mas Qoni, Mas Fatih, dan Irsal) yang telah mengajarkan kebersamaan dalam suka maupun duka.
11. Kakak-kakak kamar A3, yang telah mensupport dan membimbing saya sebagai partner kerja sekaligus adik.
12. Sahabat kecilku (Diyah, Laila, Kenty, Rapanca, Aripin, Kholiq) yang telah menjadi motivator dan teladan dalam setiap langkah.
13. Teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2016, khususnya kelas C yang menemani berjuang.

14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terimakasih telah memberikan do'a, dukungan dan motivasi selama menjalani Pendidikan di Yogyakarta.

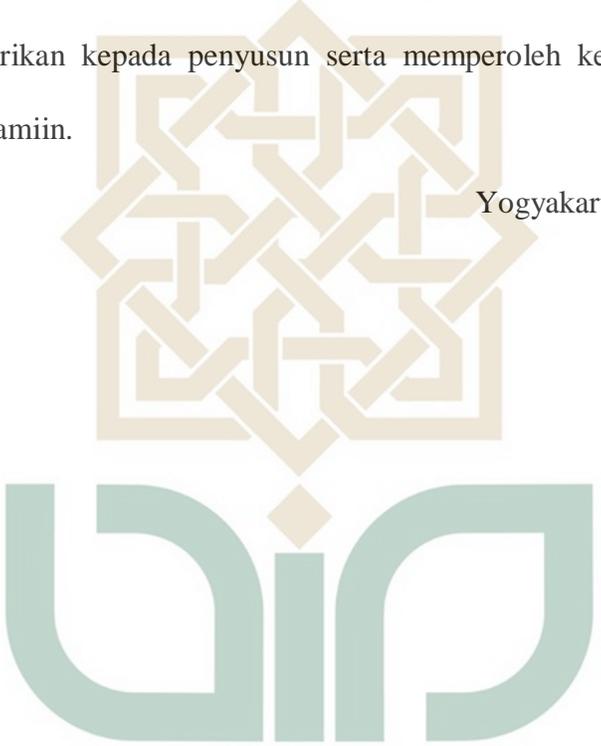
Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kebaikan atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penyusun serta memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Aamiin.

Yogyakarta, 15 September 2020

Penyusun,



Heni Eka Adhamia
NIM. 16810078



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Landasan Teori.....	14
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	14
2. Belanja Daerah	16
3. Dana Alokasi Umum (DAU)	18
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	20
5. Dana Bagi Hasil (DBH)	21

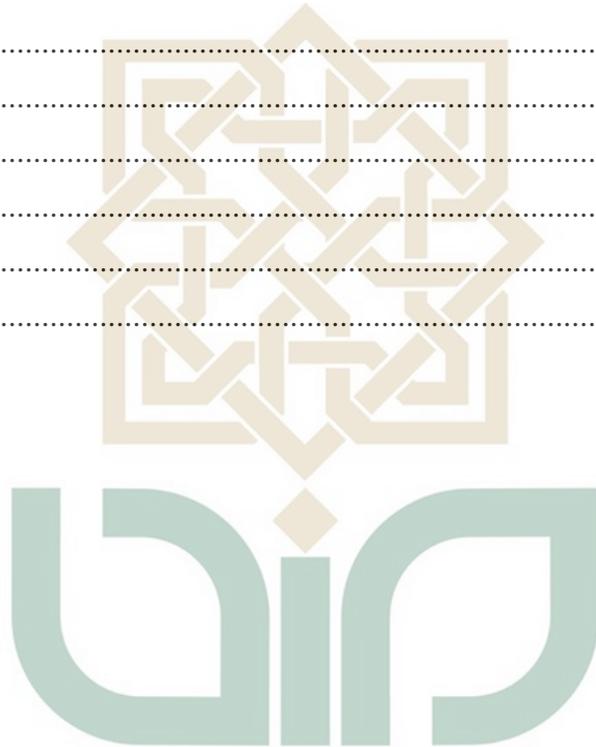
6. Jumlah Penduduk.....	22
7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	23
8. Konsep Belanja Menurut Ekonomi Islam.....	24
B. Telaah Pustaka	26
C. Pengembangan Hipotesis.....	36
D. Kerangka Pemikiran Teoritis	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Sumber dan Jenis Data	40
C. Populasi dan Sampel.....	42
D. Definisi Operasional Variabel.....	43
1. Belanja Daerah	43
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	44
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	44
4. Dana Bagi Hasil (DBH)	45
5. Jumlah Penduduk	45
6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	46
E. Teknik Analisis Data.....	47
1. <i>Common Effect Model</i>	48
2. <i>Fixed Effect Model</i>	49
3. <i>Random Effect Model</i>	49
4. Uji <i>Chow</i>	50
5. <i>Hausman's Test</i>	50
6. Uji Lagrange Multiplier	51
7. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F).....	52
8. Koefisiensi Determinasi (R ²).....	52
9. Uji Parsial (Uji-t).....	53
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN	54

A. Gambaran Umum Penelitian.....	54
1. Dana Alokasi Umum (DAU)	54
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	59
3. Dana Bagi Hasil (DBH)	64
4. Jumlah Penduduk	69
5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	73
B. Hasil Estimasi dan Regresi	77
1. <i>Common Effect Model</i>	77
2. <i>Fixed Effect Model</i>	78
3. <i>Random Effect Model</i>	80
C. Pemilihan Model	81
1. Uji <i>Chow</i>	81
2. Uji <i>Hausman's</i>	82
D. Hasil Estimasi Pemilihan Model (<i>Fixed Effect</i>).....	83
1. Uji F.....	84
2. Pengujian Koefisiensi Determinasi (R ²)	85
3. Uji t.....	85
E. Analisis Hasil Regresi Data Panel.....	87
1. Hubungan Antara DAU dengan Belanja Daerah	87
2. Hubungan Antara PAD dengan Belanja Daerah	88
3. Hubungan Antara DBH dengan Belanja Daerah.....	88
4. Hubungan Antara Jumlah Penduduk dengan Belanja Daerah	89
5. Hubungan Antara PDRB dengan Belanja Daerah.....	89
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Keterbatasan.....	92
C. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	31
Tabel 2.2.....	39
Tabel 3.1.....	41
Tabel 4.1.....	78
Tabel 4.2.....	79
Tabel 4.3.....	80
Tabel 4.4.....	82
Tabel 4.5.....	83
Tabel 4.6.....	84



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

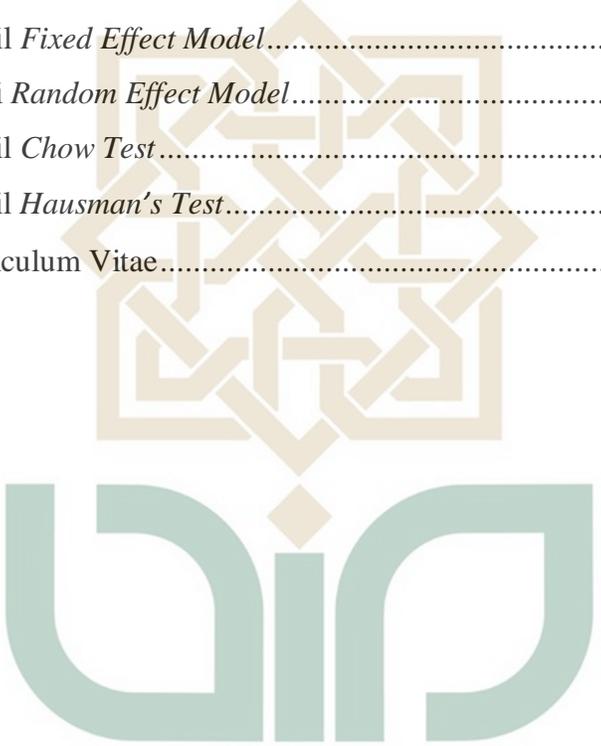
DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	4
Grafik 1.2	5
Grafik 4.1	55
Grafik 4.2	56
Grafik 4.3	58
Grafik 4.4	60
Grafik 4.5	61
Grafik 4.6	63
Grafik 4.7	65
Grafik 4.8	66
Grafik 4.9	68
Grafik 4.10.....	70
Grafik 4.11.....	71
Grafik 4.12.....	72
Grafik 4.13.....	74
Grafik 4.14.....	75
Grafik 4.15.....	76

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Belanja Daerah, DAU, PAD, DBH, Jumlah Penduduk, PDRB Tahun 2015-2018.....	100
Lampiran 2 Statistik Deskriptif	117
Lampiran 3 Hasil <i>Common Effect Model</i>	117
Lampiran 4 Hasil <i>Fixed Effect Model</i>	118
Lampiran 5 Hasil <i>Random Effect Model</i>	119
Lampiran 6 Hasil <i>Chow Test</i>	120
Lampiran 7 Hasil <i>Hausman's Test</i>	121
Lampiran 8 Curriculum Vitae.....	123



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya kemandirian daerah dimulai sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi. Desentralisasi ini memberikan kesempatan munculnya otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi daerah merupakan upaya yang sangat bagus karena dengan begini pemerintah daerah memiliki peranan yang besar dalam mengatur wilayahnya dan meningkatkan perekonomian daerah. Yang dimaksud dengan otonomi yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004). Tujuan dibentuknya desentralisasi tidak lain adalah untuk memberikan keleluasaan kepala daerah dalam mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri, dengan pelayanan dan metode yang lebih dekat dengan masyarakatnya.

Sebagaimana disebutkan bahwa, “pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut dasar hukum otonomi daerah”. Kemudian “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.” Dan “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” (Ayat 2, 5, 6 Pasal 18 UUD 1945). Dalam pasal tersebut diketahui bahwa urusan daerah menjadi urusan sendiri pemerintah daerah yang dilakukan berdasarkan asas otonomi juga sebagai tugas pembantuan kemudian terdapat pemisahan wewenang. Dalam hal merumuskan anggaran pendapatan dan belanja daerah juga menjadi wewenang atau tanggungjawab daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam sistem perekonomian, penerimaan suatu daerah bersumber dari pungutan pajak, pinjaman. Yang kemudian dibelanjakan daerah guna memenuhi kebutuhannya. APBD adalah susunan anggaran alokasi pendanaan oleh pemda yang sebelum ditetapkan sudah dibahas dan disepakati oleh pemda dan DPRD serta telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (UU no 32 tahun 2004). APBD juga terdiri dari tiga poin penting yaitu belanja, pendapatan dan pembiayaan (DJPK, 2017). Apabila ketiga hal tersebut dikendalikan dengan sungguh-sungguh dalam segi kebijakan, koordinasi, dan realisasi tentu berdampak baik bagi daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat merealisasikan anggaran belanja daerahnya tepat pada sasaran. Sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati dan memanfaatkan pelayanan publik tanpa dibeda-bedakan.

Untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah melalui APBD, pemda mempunyai pemasukan sendiri yang berwujud Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penggunaannya merupakan wewenang pemda. Meskipun pemerintah pusat tetap membantu keuangannya melalui Dana Alokasi Umum

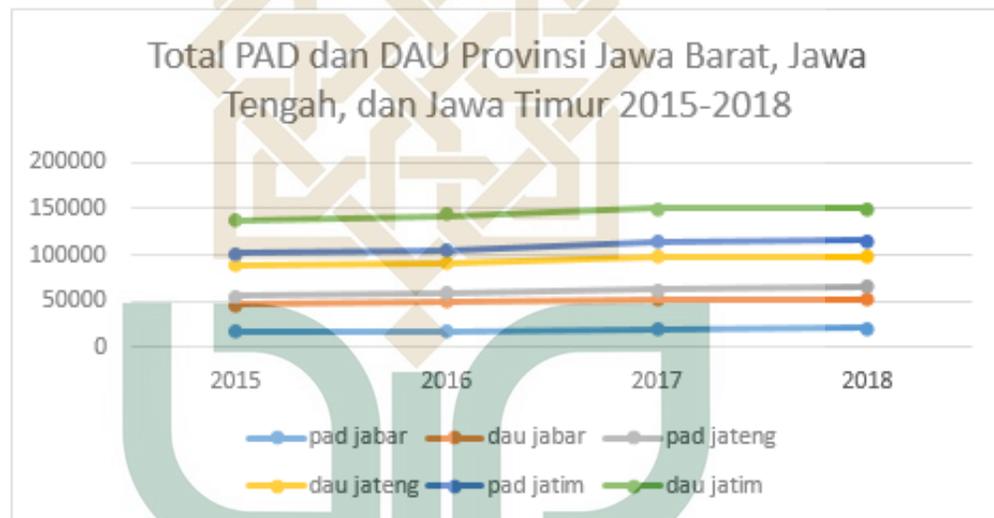
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang berupa sumberdaya alam dan pajak. Harapannya agar dana transfer ini dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan target oleh pemerintah daerah untuk menaikkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat (Hilman, 2014). Sedangkan harapan pemerintah daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai modal utama pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang pengelolaannya secara mutlak menjadi kewenangan daerah. Namun saat ini kondisi tersebut masih belum terpenuhi. Beberapa penelitian telah menyimpulkan bahwa mayoritas taraf desentralisasi fiskal di Indonesia masih di bawah target (Kuncoro 1995:3-17). Kondisi demikian sudah berlaku di sebagian besar daerah, termasuk yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, di mana dari pendapatan daerah yang tercantum dalam statistik keuangan pemerintah daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, ternyata pos pendapatan berupa dana perimbangan khususnya DAU dari pusat merupakan sumber penerimaan yang lebih besar daripada pos lainnya dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Tidak jarang saat ini ditemukan bahwa banyak pemerintah daerah yang masih mengandalkan keuangan daerahnya pada Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membayar pengeluaran modal dan pembangunan dengan tidak memperhatikan atau melupakan peningkatan potensi daerah itu sendiri. Ketika DAU yang diterima oleh suatu pemerintahan daerah besar maka di tahun

berikutnya pemerintah daerah tersebut berikhtiar agar persentase DAU yang diterima tidak menurun lebih-lebih dapat meningkat (Hilman, 2014). Sebagai gambaran perbandingan DAU dan PAD Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang dijadikan obyek oleh peneliti, berikut merupakan total PAD dan DAU di ketiga propinsi tersebut dari tahun 2015-2018:

Grafik 1.1 Total PAD dan DAU provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Tahun 2015-2018

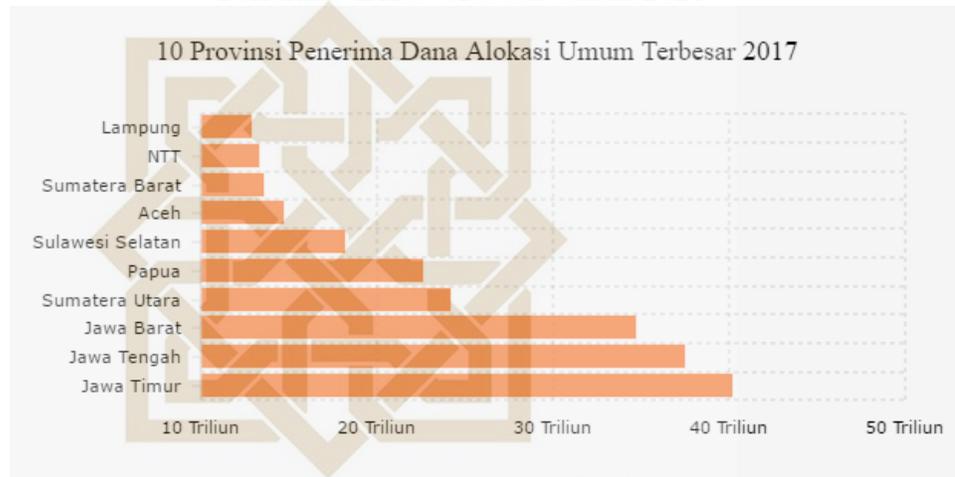


Sumber: Kemenkeu-DJPK

Pada Grafik di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2018 kontribusi DAU di ketiga provinsi tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan PAD. Seluruh DAU yang diterima oleh pemerintah daerah diupayakan habis terealisasi seluruhnya. Dengan demikian, dalam anggaran periode selanjutnya dapat mendapatkan persentase DAU yang sama atau justru meningkat (Hilman, 2014). Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur adalah termasuk provinsi dengan penerimaan DAU terbesar pada tahun 2017.

Berikut adalah sepuluh provinsi dengan penerimaan DAU terbesar pada tahun 2017 yaitu:

Grafik 1.2
Penerima DAU terbesar tahun 2017



Sumber: databoks (kemenkeu: 2016)

Dari grafik 1.2 di atas dapat diketahui bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang menerima Dana Alokasi Umum (DAU) terbesar pada tahun 2017 dengan nilai mencapai Rp 37 triliun. Di urutan kedua adalah Jawa Tengah dan di posisi ketiga adalah Jawa Barat, di mana masing-masing mendapatkan Rp 35 triliun dan Rp 32 triliun.

Sebagai dampak pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, pmda harus bisa mengatasi semua kondisi yang dihadapi. Seperti program, kebijakan, dan keuangannya. Dalam hal ini, PAD yang dikategorikan sebagai patokan keberhasilan daerah dalam desentralisasi harus terus ditingkatkan. Namun, ditemukan kebenaran bahwa daerah belum sanggup memenuhi kebutuhan

belanjanya baik secara langsung maupun tidak langsung jika tidak dibantu dengan keuangan pusat. Dengan demikian, pemerintah pusat mencetuskan kebijakan kepada pemerintah daerah terkait pemberian bantuan dalam keuangannya dengan disertai adanya dana perimbangan (Hariyanto, 2006).

Selain Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari suatu daerah, kondisi ekonomi suatu daerah juga dapat dilihat dari segi makro ekonomi, yakni dengan melihat besaran PDRB riil. Meningkatnya PDRB suatu daerah, akan menuntut penyediaan anggaran belanja daerah, di mana PDRB sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yang di antaranya adalah semakin banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah. Maka selain mempengaruhi PDRB riil juga akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan anggaran belanja daerah. Maka dengan bertambahnya jumlah penduduk tentu akan mempengaruhi besaran anggaran belanja daerah itu sendiri (Sasana, 2011).

DJPK-Kemenkeu (2019), suatu lembaga perimbangan keuangan, menyatakan bahwa untuk meminimalisir kesenjangan antar wilayah yang disebabkan keterlambatan pembangunan daerah, pemerintah mengalokasikan dana transfer ke daerah dan Dana Desa. Dana Desa itu sendiri mulai dialokasikan sejak tahun 2015. Dalam kurun waktu empat tahun pertama yaitu tahun 2015-2018 sebesar Rp 258 triliun. Seiring dialokasikannya Dana Desa, dapat kita lihat bahwa Dana Alokasi Umum juga meningkat dari tahun ke tahun seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Ketika Desa mendapatkan bantuan

langsung melalui program ini, seharusnya pendapatan yang berasal dari daerah dapat digunakan sepenuhnya untuk keperluan belanja. Karena program-program baru untuk meningkatkan usaha suatu Desa yang berada di bawah cakupan daerah kabupaten/Kota sudah disokong oleh Dana Desa. Hal ini juga tentu akan mengurangi besaran DAU dan DBH yang disalurkan. Namun, pada kenyataannya dalam empat tahun tersebut kondisi ini belum memberikan dampak yang jelas terhadap besaran anggaran penerimaan.

Sebagaimana penelitian terdahulu yaitu penelitian Wati dan Fajar (2017) terkait pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Bandung. Hasilnya diketahui bahwa PAD mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap belanja daerah. Kemudian dana perimbangan juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja daerah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fatimah, dkk (2019) terkait pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. Hasilnya diketahui bahwa PAD memiliki pengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Kemudian DAU memiliki pengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Selanjutnya DAK memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah, dan DBH juga memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap belanja daerah.

Sasana (2011) menyatakan dalam penelitiannya bahwa PDRB riil mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini berarti setiap peningkatan PDRB maka belanja daerah mengalami kenaikan.

Dana perimbangan juga mempunyai hubungan yang positif terhadap belanja daerah, dan mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah. Berarti jika setiap dana perimbangan terjadi peningkatan maka belanja daerah juga mengalami peningkatan. Selanjutnya, jumlah penduduk mempunyai hubungan yang positif terhadap belanja daerah, dan mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah. Kemudian PAD juga mempunyai hubungan yang positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja daerah.

Secara konseptual, daerah dalam kategori maju juga memiliki tingkat kemandirian fiskal yang tinggi. Karena belanja daerah merupakan kebutuhan pokok suatu daerah yang besaran anggarannya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti melihat banyak pegawai, banyaknya program pembangunan, perbaikan fasilitas, luas wilayah dan batas wilayah, juga jumlah penduduknya. Hal tersebut harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Daerah yang semestinya sudah mandiri dalam aspek keuangan melalui PAD justru lebih mengandalkan transferan dana dari pusat berupa DAU. Tujuan pengalokasian DAU adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (DJPK, 2016). Sedangkan PAD harus berperan lebih banyak terhadap daerah itu sendiri. Selain menjadi sumber asli, PAD juga tolak ukur kemandirian daerah. Sedangkan tujuan dari bantuan DBH adalah untuk meminimalisasi kesenjangan antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil (DJPK, 2017). Sebagaimana kondisi daerah tersebut yang mampu menghasilkan berbagai

sumber daya. Terkait dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi akan membutuhkan konsumsi tinggi di masa mendatang, sementara rendahnya sumber daya per kapita akan memicu pertumbuhan penduduk tidak terkendali (Kuncoro, 1997:17). Ditinjau dari pertumbuhan ekonomi dari sektor PDRB dapat menggambarkan pertumbuhan yang baik, tetapi juga beriringan dengan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Dengan demikian maka penyediaan anggaran belanja daerah juga semakin besar (Sasana, 2011). Oleh karena itu, keinginan peneliti adalah melihat dan menganalisis pengaruh beberapa variabel tersebut terhadap belanja daerah dan menjadikan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebagai daerah yang diteliti. Karena propinsi tersebut termasuk daerah yang banyak memiliki kota maju dan menduduki posisi tertinggi daerah penerima DAU di Indonesia. Adapun periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 adalah empat tahun pertama semenjak dialokasikannya dana desa dari pemerintah pusat. Motivasi dilakukannya penelitian ini karena terdapat perbedaan pada hasil penelitian (*research gap*) di mana hasil penelitian Prakosa (2004); Harianto dan Adi (2007) memperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah. Sedangkan hasil penelitian Maimunah (2006); Wandira (2013); Herlina (2013) memperoleh bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Kemudian dalam penelitian Mulyadi, Alfansi dan Benardin (2010) menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

Herlina (2013) dikatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja daerah sebagaimana teori yang ada. Secara teoritis, respon tersebut mempunyai efek distributif dan alokatif yang tidak berbeda dengan sumber pendanaan lain, misalnya pendapatan pajak daerah. Namun, dalam studi empiris hal tersebut tidak selalu terjadi. Hal itulah yang melatarbelakangi keinginan peneliti untuk memilih judul “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat, Jawa Tengah, Dan Jawa Timur 2015-2018*”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang dibuat penulis adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh DAU terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tahun 2015-2018?
2. Apakah terdapat pengaruh PAD terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tahun 2015-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh DBH terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tahun 2015-2018?
4. Apakah terdapat pengaruh Jumlah Penduduk terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tahun 2015-2018?
5. Apakah terdapat pengaruh PDRB terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tahun 2015-2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh DAU terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tahun 2015-2018?
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh PAD terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tahun 2015-2018?

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh DBH terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tahun 2015-2018?
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Jumlah Penduduk terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tahun 2015-2018?
5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh PDRB terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tahun 2015-2018?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi belanja daerah dengan harapan dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Pemerintah Negara Indonesia, diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai salah satu referensi putusan kebijakan yang akan diambil guna menyusun anggaran belanja daerah.
- b. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan bacaan dan wawasan dalam penelitian

mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga berikutnya khususnya dalam bidang anggaran belanja daerah.

- c. Bagi peneliti, sebagai penambah pengetahuan dalam hal Belanja Daerah. Penulis semakin memahami keadaan yang terjadi dalam suatu lembaga pemerintahan dan sebagai pelatihan untuk semakin berkembang serta dapat menerapkan apa yang telah dipelajari selama belajar.

E. Sistematika Pembahasan

Tujuan daripada sistematika pembahasan antara lain untuk mempermudah peneliti dan pembaca serta dapat memberi gambaran yang jelas terkait susunan skripsi ini, pembahasan dimulai dari bab 1 sampai bab 5 yang meliputi:

Bab I adalah bab pertama yang berkaitan dengan pendahuluan seperti; masalah penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan bagi pihak kampus maupun pribadi, serta sistematika pembahasan sebagai pedoman penulis.

Bab II berisi tentang landasan teori yang bahasannya mengenai landasan teori terkait belanja daerah dan variabel bebas yang menjadi pengaruhnya, telaah pustaka, pengembangan hipotesis dalam penelitian ini, dan kerangka pemikiran mengenai hubungan antar variabel X dan variabel Y

Bab III metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian yang digunakan, sumber dan jenis data dari mana peneliti mengambil data tersebut, populasi dan sampel, definisi variabel-variabel, dan terkait teknik analisisnya menggunakan data panel.

Bab IV adalah Penelitian dan Pembahasan di mana dalam bab ini banyak berkaitan dengan penelitian ini dan hasil analisis penelitian terkait rumusan masalah dan tujuan dilakukannya penelitian ini.

Bab V merupakan penutup, yaitu bagian akhir dari penulisan susunan penelitian ini. Isi bab ini adalah saran serta masukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pengujian, analisis, dan pembahasan yang sudah dilakukan oleh penulis mengenai pengaruh variabel Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan PDRB dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, DAU mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa H_1 diterima, di mana DAU mempengaruhi Belanja Daerah melalui fungsinya sebagai alat pemerata kesenjangan antar daerah.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan hubungan yang positif secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian, PAD mempengaruhi Belanja Daerah melalui perannya sebagai asal pembiayaan pembangunan daerah. Jika PAD meningkat maka jumlah Belanja Daerah pun juga semakin meningkat.
3. Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh yang sama seperti DAU dan PAD, yaitu memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Penelitian ini memberikan hasil H_3 diterima, di mana semakin tinggi DBH suatu daerah maka semakin besar pula kebutuhan belanja suatu daerah dalam pembangunan SDA lainnya selain sektor unggulan di daerah tersebut.

4. Jumlah Penduduk berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa H_4 diterima, di mana jumlah penduduk berpengaruh terhadap Belanja Daerah melalui peningkatan pemanfaatan layanan publik di daerah tersebut. Jika jumlah penduduk suatu daerah meningkat maka belanja daerah pun juga mengalami peningkatan.
5. Variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Di mana dalam penelitian ini menunjukkan H_5 ditolak. Dengan demikian semakin bertambahnya nilai PDRB tidak mempengaruhi besaran anggaran belanja daerah. Karena PDRB terlampaui jauh dibandingkan dengan PAD, DAU, dan DBH.

B. Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini banyak ditemukan sejumlah kekurangan dan keterbatasan. Adapun kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini adalah:

1. Terbatasnya jumlah variabel yang digunakan karena kurang lengkapnya data yang telah dipublikasi.
2. Keterbatasan menggunakan tahun terupdate.
3. Kurangnya penelitian terdahulu terkait belanja daerah yang mendukung referensi penelitian.

C. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diperoleh di atas, diketahui bahwa empat variabel dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dengan demikian, dapat dilakukan beberapa langkah efektif untuk memanfaatkan faktor-faktor tersebut guna menyalurkan belanja daerah/pengeluaran daerah dengan pendapatan daerah melalui kebijakan anggaran belanja daerah. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dapat mendukung berbagai upaya guna menyalurkan pendapatan dan belanja daerah. Selain itu evaluasi kebijakan mengenai penyaluran dan pengalokasian dana transfer seperti DAU dan DBH perlu ditingkatkan untuk menghindari penggunaan dana yang tidak tepat sasaran. Hal ini dimaksudkan agar tujuan pemerintah dengan dana transfer sebagai alat pemerataan pembangunan dapat terealisasi dengan baik.
2. Perlu meningkatkan PAD sebagai potensi atau salah satu sumber pembelanjaan daerah dengan memanfaatkan sektor-sektor yang memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, dengan PAD yang tinggi dapat menjadi daerah yang mandiri karena dapat membiayai belanja pegawai atau sarana prasarannya sendiri. Sedangkan DAU dan DBH dapat digunakan untuk mengembangkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang mampu menciptakan kesejahteraan sosial.

3. Perlu adanya upaya untuk menekan angka jumlah penduduk, karena meningkatnya jumlah penduduk akibat meningkatnya angka kelahiran dan banyaknya lansia. Sementara, penduduk dengan usia bayi, anak-anak, dan lansia termasuk dalam kategori non bekerja. Pemerintah diharapkan mampu menekan kelahiran guna mengurangi jumlah penduduk karena hal ini dapat menambah beban suatu daerah termasuk pemanfaatan sarana prasarana tanpa diimbangi dengan pendapatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrizon, dkk. (2016). “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2005-2014”’. *Jurnal*. STKIP PGRI Sumatera Barat.
- Al-Quran al-Karim. 2008. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Arif, Firman Muhammad. (2019). “Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid Al-Syari’ah: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo”’. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol.13, No.1, hal 51-74.
- Argi, R. (2011). “Analisis Belanja Daerah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2009”’. *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Bastian, Indra dkk. (2002). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bogor (2010).
- Badan Pusat Statistik Indonesia (2019).
- David Harianto dan Prio Hari Adi. (2007). *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per Kapita*. Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar 26-28 Juli 2007.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2019).
- Fatimah, dkk. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah*. EQUITY. Vol.22, No.2.
- Fatmawati. (2018). “Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Enrekang”’. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.
- Ghozali, Imam dan Ratmomo, D. (2008). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD)*, (Translate : Financial Accounting of Governmental Entities), Semarang: Badan Penerbit UNDIP. ISBN 978.979.704.563.0.

- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gujarati, Damodar. (2003). *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarmo Zain, Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodar N. (2004). *Basic Econometrics, Forth Edition, Singapore*. McGraw-Hill, New York.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Hariyanto, Ronald. (2006). “Analisis Pengeluaran Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000-2002”. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Herlina, Erlita. (2013). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Berau”. *Jurnal Ekonometrika-Bisnis*. Vol.4, No.1, hal. 25-44.
- Hilman, Muhammad. (2014). “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah di Kota Medan Periode 1999-2012”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Erlangga.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Lubis, Deni. (2011). “Penyusunan Anggaran Belanja Dengan Pendekatan Ad-Daruriyyat Al-Khams/Maqashid As-Syariah: Studi Kasus APBD Kabupaten Bogor Tahun 2011”. *Jurnal Al-Muzara'ah*. Vol.1, No.2.

- Mahulete, Umami K. (2016). "Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku". *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Maimunah, Mutiara. (2006). *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Simposium Nasional Akuntansi IX Padang 23-26 Agustus 2006.
- Mangkoesebroto, Guritno. (1997). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Martono, Nanang. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mutiya. (2013). "Analisis Kontribusi Sektor-Sektor Perekonomian Terhadap PDRB di Kabupaten Aceh Barat". *Skripsi*. Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat.
- Mulyadi, dkk. (2010). "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu". *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*. Vol.3, No.1, ISSN: 1979 7338.
- Ningrum, Widyasari Kusuma. (2018). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten Cilacap Periode 2011-2015". *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Noordiawan, Deddi. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pangesti, Novita Dwi. (2020). "Pengaruh Daya Saing Global terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Tujuh Negara ASEAN Tahun 2007-2017". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Pasal 41 Nomor 55 Tahun 2005 *Tentang Dana Perimbangan*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Prakosa, Kesit Bambang. (2004). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY)*. JAAI Vol. 8 No. 2, 101-118.

- Rahmawati, N. I. (2010). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)". *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sanusi, Anwar dan Yusuf, Mohammad. (2018). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara Tahun 2013-2015 Pendekatan Panel Regression". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol.3, No.1.
- Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2000, No. 246. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No. 33 Tahun 2000 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 126. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Lembaran Negara RI Tahun 2005, No. 4575. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Realisasi APBD Tahun 2017-2018 Total propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam: www.djpk.depkeu.go.id.
- Ruwaida, dkk. (2015). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran Belanja Pendidikan di Provinsi Aceh". *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana*. Universitas Syiah Kuala. Vol.4, No.4.
- Sari, Puspita., Noni., dan Yahya, Idar. (2009). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung*. Universitas Sumatera Utara.
- Sasana, H. (2011). "Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol.18, No.1, hal. 46-58.

- Viara, Rika dan Pujiati, Lilik. (2019). “Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Untuk Membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Jombang”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*. Vol. 2, No.1, hal. 12-23.
- Wandira, Arbie Gugugs. (2013). “Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal”. *Accounting Analysis Journal (AAJ)*. Vol.2, No.1, ISSN: 2252-6.
- Wati, Masayu Rahma dan Fajar, Catur Martian. (2017). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung”. *Jurnal Kajian Akuntansi*. Vol.1, No.1, hal. 63-76.
- Widarjono, Agus. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wulandari, Yolanda. (2014). “Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia”. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.